**STRATEGI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN POROS
MARITIM DUNIA MELALUI INDIAN OCEAN RIM
ASSOCIATION (IORA) PADA TAHUN 2015-2017**

By: Frans Saputra Rumapea

Email: franssaputrarumapea15@gmail.com

Supervisor: Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP., M.Si

Bibliography: 34 Books, 18 Journals, 6 Documents, 56 Websites

Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km.12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293

Telp: 0761-63272/ Fax: 0761-566821

Abstract

This study aims to review Indonesia's strategy in realizing the world maritime axis through the IORA in 2015-2017. Indonesia revives the call to become a maritime nation with the concept of the Indonesian maritime axis that is relevant to the geographical, historical and cultural potentials of the ancestors. Indonesia. Indonesia realizes the maritime axis through IORA, because IORA has six main priorities and two special areas that are relevant to the five pillars of the Indonesian maritime axis and supported by Indonesia occupying the leadership of IORA in 2015-2017.

The research applied a neorealism perspective and analyze the problem toward the research implemented a level analysis of groups with the concept of the world maritime axis. This research also implemented the theory of international cooperation. the research applied qualitative research methods and literature studies. The research collects from books, journals, documents, and the websites.

The results of this research shows that maritime culture, empowering marine resources, maritime connectivity, maritime diplomacy and maritime defences are way the essential to world maritime axis. In efforts to optimize the maritime axis, Indonesia cooperates with South Africa, Sri Lanka and Mozambique. Indonesia by IORA expand and dominate African countries.

Keywords: Strategy, Maritime Axis, IORA.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan (*archipelago state*) yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil dengan jumlah ± 17.000 pulau¹ dengan luas laut mencakup 5,8 juta km² atau sekitar 80% dari total luas Indonesia.² Indonesia secara geografis membentang dari 6⁰ LU (Lintang Utara) sampai 11⁰ LS (Lintang Selatan) dan 92⁰ sampai 142⁰ BT (Bujur Timur) terletak diantara dua samudra (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia) dan dua benua (Benua Asia dan Benua Australia). Wilayah perairan Indonesia terletak pada posisi silang dunia yang menjadi bagian dari *Sea Lanes of Communications* (SLOCs) dan *Sea Lines of Trade* (SLOT) serta *Sea Lanes of Economics* (SLOE) yang merupakan jalur transportasi urat nadi perekonomian dunia.³ Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*The Largest Archipelago in the World*) memiliki garis pantai ± 95.181 km terpanjang kedua setelah Kanada.

Indonesia memiliki unsur-unsur dalam membangun sebuah negara poros maritim; (i) *geographical position* atau letak geografis; (ii) *physical conformation* atau sifat fisik; (iii) *extent of territory* atau luas wilayah; (iv) *number of population* atau jumlah penduduk; (v) *character of the people* atau watak dari penduduk; dan (vi)

¹ I Nengah Putra AK Susilo, U Ciptomulyono, "Maritime Strategy Development to Encounter the Threat of National Sea Security in Indonesia Territory.," *Journal of Defense Resources Management*. 9, no. 2 (2018): 147–171. Hal 149.

² Ibid. Hal. 150.

³ Marsetio, *Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia*. (Jawa Barat: Universitas Pertahanan, 2018). Hal 8.

character of the government atau watak dari pemerintah.⁴

Indonesia yang memiliki luas laut yang sangat luas berbeda dengan daratan, laut tidak dapat di duduki secara permanen, atau dikuasai secara mutlak. Laut yang luas yang dimiliki Indonesia memiliki fungsi vital, yaitu; *National Territorial Integration, Sea Transportation Equipment, Natural Resource Deposits*, dan *National Defense and Security*. Fungsi non-vital laut bagi Indonesia, yaitu; *Tourism, Sports, Research, etc.* Laut hanya dapat dimonitori dalam jangka waktu yang terbatas. Laut bagi bangsa Indonesia memiliki arti penting, yaitu;⁵

1. *Unifying Nations*, sebagai media pemersatu bangsa yang membentuk satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara.
2. *Relationship*, sebagai media perhubungan untuk pemerataan pembangunan dan mempercepat arus distribusi komoditas.
3. *Natural Resources*, sebagai penyedia sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
4. *Security Defense*, sebagai media pertahanan dan keamanan dalam menjaga kedaulatan negara serta menjaga stabilitas keamanan secara menyeluruh.

⁴ A. T. Mahan, *The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783*. 12th Edition, (Boston: Little, Brown, 1918). Hal. 28-29.

⁵ Marsetio, *Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia*. Hal 38-39.

5. *Maritime Diplomatic*, sebagai media untuk membangun pengaruh terhadap negara lain.

Dalam menerapkan dan melakukan diplomasi, setiap negara melakukan kegiatan politik negeri tersebut berdasarkan kepentingan-kepentingan dalam negeri dan hal tersebut tidak terlepas Indonesia. Indonesia sudah sejak lama menggunakan laut sebagai sektor terpenting kehidupan masyarakatnya sampai ke ranah kepentingan nasionalnya. Nyanyan “Nenek Moyangku Seorang Pelaut” lekat ditelinga masyarakat Indonesia, mengingat secara historis para leluhur bangsa ini adalah pelaut.

Sejarah kemaritiman Indonesia membuktikan bahwa NKRI merupakan legasi bagi negara-bangsa maritim yang hidup pada abad ke-5 hingga pertengahan abad ke-14. Kesuksesan dari Sriwijaya dalam membangun hub-ports terkemuka di kawasan Asia Tenggara dan Majapahit dengan lima armada kapal perang terkuat pada zamannya menjadi sebuah titik balik sejarah akan kejayaan Indonesia di masa lampau akan strategi kemaritiman yang kaya. Namun 70 tahun negeri ini merdeka dimana lautan lebih luas dari daratan tapi selama ini potensinya belum digarap secara optimal. Ini karena kebijakan dari pemerintah selalu berubah-ubah dan tidak konsisten dalam menggali potensi laut.

Presiden RI pertama, Soekarno, mendeklarasikan “Deklarasi Wawasan Nusantara” pada tanggal 13 Desember 1957 di masa kepemimpinan Perdana Menteri Djuanda dan diakui secara internasional sebagai *Archipleagic*

State.⁶ Ada dua aspek utama yang diperjuangkan pada deklarasi Juanda: perluasan laut teritorial yang semulanya 3 mil menjadi 12 mil sehingga luas wilayah Republik Indonesia 2,5 kali lipat lebih besar dari yang semula 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² dan menetapkan aturan perairan kepulauan yang membatasi pelayaran di luar izin yang dilakukan negara lain.⁷

Kemudian berganti ke era orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto strategi maritim yang sempat mandek, dikarenakan pemerintahan junta militer yang terpusat pada supremasi matra AD, yang diikuti dengan alur pembangunan nasional yang sentralistik terhadap daratan yang mana mengejar program swasembada pangan. Kendati di akhir kepemimpinannya Soeharto mencoba memperkenalkan doktrin yang disebut sebagai Benua Maritim Indonesia (BMI), namun nyatanya tidak ada program konkret yang dijalankan untuk melaksanakan kebijakan strategis di bidang kemaritiman⁸

Secara berkesinambungan, perjuangan untuk mengembangkan kebaharian Nusantara terus dilakukan. Pada tahun 1998, presiden B.J. Habibie kembali mendeklarasikan visi pembangunan kelautan bangsa Indonesia dalam sebuah “Deklarasi Bunaken”. Inti deklarasi tersebut adalah pema-

⁶ Daoed Joesoef, *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014). Hal 96

⁷ Probo Darono Yakti dan Joko Susanto, “Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia : Antara Perubahan atau Kesinambungan Strategi?,” *Global dan Strategis* 11, no. 02 (2017): 108–125.

⁸ *Ibid.*

haman bahwa laut merupakan peluang, tantangan, dan harapan untuk masa depan persatuan, kesatuan, dan pembangunan bangsa Indonesia.⁹ Pada era presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dibentuklah Departemen Eksplorasi Laut pada tanggal 10 November 1999 yang menjadi cikal bakal Kementerian Perikanan dan Kelautan sudah mulai ada arah optimalisasi potensi kelautan.

Pada masa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikenal dengan motto *a million friends and zero enemies* (sejuta kawan, nol musuh). Semboyan *a million friends zero enemy* (sejuta kawan, nol musuh) merupakan sebuah semboyan yang hadir menghiasi kebijakan luar negeri Indonesia era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebuah semboyan yang dimaksudkan untuk menampilkan Indonesia sebagai negara yang mampu menjalin kerja sama ke segala penjuru (*all direction foreign policy*) dalam situasi global yang sedang bergejolak sebagaimana dilukiskan presiden SBY lewat kiasan “*navigation a turbulent ocean*” (mengarungi samudra bergejolak). Pemerintah meyakini diperlukan sikap kerja sama tanpa menunjukkan keperpihakan. Dengan kata lain, semboyan *a million friends zero enemies* yang dilandasi atas prinsip tanpa musuh penting untuk menjadi penekanan netralitas sikap

Indonesia ditengah pusaran gejolak polaritas yang semakin kompleks.¹⁰

Kemudian pada kepemimpinan presiden Joko Widodo, beliau membangkitkan kembali gagasan PMD melalui kampanyenya dalam pemilihan umum pada tahun 2014 silam. Gagasan PMD Jokowi-JK dengan judul Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian dengan Visi adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang diwujudkan melalui sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita.

Indian Ocean Rim Association adalah asosiasi kawasan Samudera Hindia. IORA kadang disebut IORARC (*Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation*) sebuah kerjasama regional yang berisikan negara-negara Samudera Hindia yang dibentuk di Mauritius tahun 1997. Berdirinya IORA dilatarbelakangi pasca Perang Dunia II ketika hegemoni Inggris berhenti dan persaingan antara negara-negara superpower di regional ini melejit. Persamaan latarbelakang sejarah dan geopolitik ini melahirkan rasa kesamaan identitas di antara negara-negara dalam kawasan Samudra Hindia.¹¹ IORA memiliki enam prioritas utama serta dua area khusus, yakni; *Maritime Safety & Security, Trade & Investment Facilitation, Fisheries*

⁹ LEMHANNAS. “Swantara” dalam http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Swantara/Swantara_11_Desember_2014.pdf diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 06:43 WIB.

¹⁰ Ziyad Falahi, “Memikirkan Kembali Arti Million Friends Zero Enemy dalam Era Paradox of Plenty,” *Global & Strategis* 7 (2013): 227–240.

¹¹ IORA. “About IORA” dalam www.iora.int/en/about/about-iora diakses pada tanggal 24 Oktober 2020 pukul 16:20 WIB.

Management, Disaster Risk Management, Academic, Science & Technology, Tourism & Cultural Exchanges, Blue Economy, dan Women's Economic Empowerment.

Tujuan utama didirikan IORA untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang bagi semua negara anggota dan menciptakan landasan yang kuat bagi kerja sama ekonomi kawasan melalui upaya fasilitas perdagangan dan menghilangkan hambatan perdagangan.

Perwujudan komitmen berbagai bidang kerja sama tersebut diwujudkan dalam sejumlah platform, yaitu; *Council of Ministers (COM)*, *Committee of Senior Officials (CSO)*, *Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG)*, *Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF)*, *Working Group on Trade and Investment (WGTI)*, *TROIKA* dan *Working Group of Heads of Mission (WGHM)* serta memiliki dua observer, yaitu *Indian Ocean Research Group (IORG)* dan *Indian Ocean Tourism Organization (IOTO)*.

Pakar Senior Hukum Laut Hasyim Djalal mengemukakan bahwa negara maritim tidak sama dengan negara kepulauan.¹² Negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan laut, walaupun negara tersebut mungkin tidak punya laut, tetapi mempunyai kemampuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan peralatan untuk memanfaatkan laut tersebut, baik ru-

angnya maupun kekayaan alam dan letak strategis.¹³ Indonesia yang memiliki luas laut 2/3 dari luas keseluruhan wilayahnya hingga saat ini belum menjadi negara maritim dan barulah sebatas negara kepulauan. Indonesia sejatinya sudah seharusnya menjadi negara maritim yang memiliki *given factor* dalam syarat sebuah negara maritim.

Indonesia melalui IORA mewujudkan PMD yang didukung dengan memegang tapuk kepemimpinan ketua IORA pada tahun 2015-2017. Indonesia dibawah kepemimpinan Jokowi mengimplementasikan Doktrin PMD yang menggunakan ke-maritiman sebagai fundamental konsep pembangunan. Doktrin PMD adalah sebuah penyadaran bahwa Indonesia secara alamiah sebagai negara kepulauan (*archiplegic state*) dengan unsur geopolitik dan mendorong Indonesia menjadi negara dengan kekuatan maritim yang dapat dipertimbangkan.¹⁴ Dengan demikian, Indonesia melihat IORA sebagai wadah untuk melangsungkan kepentingan kepentingan negara.

Indonesia memiliki beberapa permasalahan maritim dan tantangan dalam mewujudkan PMD. Adapun beberapa isu keamanan laut yang menjadi permasalahan penting baik bagi Indonesia maupun internasional adalah: (a) tingginya ancaman kekerasan, seperti pembajakan, perompakan, sab-

¹² Simela Victor Muhamad, "Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia," Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) VI, no. 21 (2014): 4. hal 6.

¹³ Marsetio, "Sea Power Indonesia" (Jakarta: Universitas Pertahanan, 2014).

¹⁴ Mervyn Piesse. *The Indonesian Maritime Doctrine: Realising the Potential of the Ocean.* Future Directions International Pty Ltd. Australia. 2015. Hal. 2.

otase, dan teror objek vital; (b) ancaman navigasi, seperti kekurangan dan pencurian alat bantu navigasi; (c) ancaman sumber daya, seperti perusakan dan pencemaran lautnya serta ekosistemnya; dan (d) ancaman kedaulatan dan undang-undang, seperti penangkapan ikan secara liar, imigran gelap, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara tidak teratur atau liar serta penyeludupan barang, orang dan senjata.¹⁵

KERANGKA TEORI

Penulis menggunakan perspektif neo-realisme dalam penelitian ini. Seperti yang dituturkan oleh teorisi neorealisme, Kenneth mengatakan bahwa komunitas dan tatanan negara-negara di dunia dibagi menjadi dua, yaitu hirarki dan anarki. Hirarki terdiri dari divisi tenaga kerja (*divisions of labor*), spesialisasi, dan struktur otoritas (*authority structure*). Seperti halnya negara bisa memasuki dan mencampuri hak otoritas tertentu dan mempertahankan monopoli kekuasaan demi ketaatan rakyatnya. Dalam hirarki terdapat otoritas tertinggi, seperti contohnya negara. Anarki memiliki konten yang berbeda dari hirarki, didalam lingkup anarki tidak ada otoritas tertinggi, tidak ada presumsi ketaatan (*obedience*). Negara-negara harus setuju dengan negara lain bahwasanya untuk mempertahankan dan mendapatkan kekuasaan dan tujuannya. Perang merupakan hal yang paling utama sebagai pendamai dari konflik

¹⁵ Sapto J. Poerwowidagdo, "Blue Ocean Strategy in Managing Maritime Security," *Jurnal Pertahanan*. 1, no. 1 (2015): 13–26.

kepentingan, dan pada akhirnya self-help adalah solusi.¹⁶

Tekanan politis dan ekonomi dari sistem internasional merupakan faktor pertama dalam pandangan neo-realisme terhadap terciptanya regionalisme. Bagi kaum neorealis, hal tersebut akan berujung pada aliansi. Aliansi merupakan salah satu bentuk kerja sama yang memperhitungkan konfigurasi power serta peran sistem politik internasional. Para aktor yang bergabung dalam sebuah aliansi akan memperlihatkan bargaining masing-masing, melakukan koordinasi strategi, dan berupaya untuk mengedepankan tujuan bersama.¹⁷ Dalam penelitian ini, terdapat sinkronisasi antara pandangan neorealisme dan peran Indonesia di dalam Indian Ocean Rim Association sebagai pemimpin dan menggunakan IORA sebagai wadah untuk mengembangkan kepentingannya. Keputusan yang keluar dari IORA tidak memiliki pengikat hukum (*legal binding*), kasus dan perspektif memiliki kecocokan, yakni tidak adanya ketaatan dalam IORA dan ditekankannya konsep "*good neighbourhood*".

Teori yang digunakan adalah *International Cooperation Theory* (Teori Kerja Sama Internasional). John J. Mearsheimer, menjelaskan bahwa kerja sama internasional lahir dikarenakan bahwa setiap negara tidak akan mampu berdiri sendiri dan mencukupi kebutuhan nasional secara mandiri ter-

¹⁶ Holsti, K.J. *Governance Without Government: Order and Change in World Politics* dalam *Governance Without Government: Polyarchy in Nineteenth-Century European International Politics*. Cambridge Press. Hal 29.

¹⁷ *Ibid.* hal 40.

lebih dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan negaranya. Kerja sama sulit untuk dicapai dan dipertahankan jika ada pertimbangan keuntungan relatif dan kekhawatiran tentang kecurangan.¹⁸

Hubungan dan kerja sama internasional muncul selain karena adanya kepentingan yang sama juga di karenakan oleh keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda pula sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan potensi dan kemampuan yang ada dari negara lainnya. Kerja sama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga berdampak pada hubungan yang makin baik antara negara satu dengan negara lainnya.¹⁹

Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi dan bertambahnya kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional negara-negara akan membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi berbagai permasalahan bersama. Institusi tersebut memajukan kerja sama lintas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak for-

¹⁸ John J. Mearsheimer, "The False Promise of International Institutions". *International Security*. 19 (3) (1995): 5-49.

¹⁹ *Ibid.*

mal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama.²⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Poros Maritim merupakan sebuah seruan untuk kembali ke jati diri negara Indonesia atau identitas nasional sebagai sebuah negara kepulauan yang mengantar negara Indonesia sebagai kekuatan maritim yang bersatu, sejahtera, dan berwibawa.²¹ Poros Maritim menjadikan titik fokus atau titik sentral kekuatan utama negara terletak pada ranah pertahanan dan ekonomi yang bertopang pada sektor laut. Berbagai potensi kelautan yang belum dioptimalkan seperti industri perikanan, galangan kapal, eksplorasi sumber daya kelautan, pembangkit energi, pariwisata bahari, pusat penelitian, kota-kota dan pemukiman nelayan, dll.

Poros Maritim pada dasarnya sebuah konsep yang berangkat dari fisik Indonesia yang memiliki luas lautan dua kali dari daratan. Konsep ini sejalan dengan potensi-potensi alamiah Indonesia dari aspek geopolitik, historis dan budaya. Konsep PMD tidak dapat didefinisikan secara harfiah mengenai sebuah kawasan yang hanya mengedepankan maritim, kebijakan ini merupakan sebuah akumulasi dari aspek sosial, budaya, politik, historis dan ekonomi.

Dalam penelitian ini, penulis mengakumulasikan titik singgung antara pilar-pilar Poros Maritim dan

²⁰ Jackson, Robert & George Sorensen. "Pengantar Studi Hubungan Internasional". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005. Hal. 63-64.

²¹ Bernhard Limbong, *Poros Maritim* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015).

enam prioritas utama serta dua area khusus *Indian Ocean Rim Association* dengan begitu penelitian ini dapat memetakan strategi Indonesia dalam mewujudkan PMD melalui IORA pada tahun 2015-2017.

Dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia, Indonesia memiliki posisi geostrategis dan geopolitis yang memberikan peluang kepada Indonesia tidak hanya sebagai jalur ekonomi global tetapi juga jalur keamanan laut internasional sehingga menempatkan Indonesia memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan. Keinginan mewujudkan Poros Maritim Dunia memerlukan strategi atau proses yang mengidentifikasi *ends-ways-means* yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut secara optimal, yakni dengan; Pertama, Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia menjadi tujuan akhir atau *ends*; Kedua, IORA sebagai Wadah Diplomasi Indonesia sebagai metode atau *ways*; Ketiga, Optimalisasi Poros Maritim Dunia melalui IORA sebagai sumber daya atau *means*.

1. Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia

Indonesia menuju Poros Maritim Dunia merupakan tujuan akhir dari strategi Indonesia mewujudkan PMD. Di kepemimpinan presiden Joko Widodo (Jokowi) menggagaskan PMD dimana menggunakan kemaritiman sebagai fundamental konsep pembangunan dengan judul “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”. Gagasan PMD diperkenalkan saat kontestasi

pemilihan presiden (pilpres) 2014, PMD merupakan salah satu ‘senjata’ andalan oleh pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK). Ide PMD awalnya diutarakan oleh dua akademisi di balik tim pemenangan Jokowi-JK pada 2014 lalu, yakni Rizal Sukma, direktur CSIS dan pengamat pertahanan Andi Widjajanto. Mereka memperkenalkan gagasan kemaritiman sebagai distungsi yang tidak ditawarkan oleh pasangan calon lain.²²

Cita-cita pemerintahan Jokowi kemudian dielaborasi lebih lanjut pada KTT Asia Timur ke-9 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Menurutnya PMD terdiri atas lima pilar meliputi: (1) budaya maritim, (2) ekonomi maritim, (3) konektivitas maritim, (4) diplomasi maritim, dan (5) keamanan maritim.²³ Visi dan misi PMD juga sejalan dengan *Jakarta Concord* pada *IORA Leader Summit 2017* yang memiliki ketersinggungan dalam keinginan Indonesia menuju PMD. Gagasan PMD diwujudkan melalui sembilan agenda pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawala Cita, yaitu: (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran

²² Yakti dan Susanto, “Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan atau Kesenambungan Strategi?”

²³ Ibid.

negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.²⁴

2. IORA Sebagai Wadah Diplomasi Indonesia

IORA menjadi wadah diplomasi Indonesia sebagai metode dan cara Indonesia mewujudkan PMD yang memiliki enam prioritas utama serta dua area khusus dan memiliki ketersinggungan terhadap lima pilar Poros Maritim Indonesia. Ketersinggungan antara tujuan IORA dan Indonesia menjadi negara PMD menjadi IORA sangat relevan sebagai wadah diplomasi Indonesia. IORA dalam Jakarta Concord memiliki komitmen sama dengan visi dan misi Poros Maritim Indonesia dalam mencapai negara kepulauan yang berwawasan nusantara

dan maritim dengan berfokus terhadap lima pilar utama, yaitu;²⁵

- a. Revitalisasi Budaya Maritim,
- b. Pemberdayaan Sumber Daya Laut,
- c. Konektivitas Maritim,
- d. Diplomasi Maritim dan
- e. Pembangunan Pertahanan Maritim

2.1 Revitalisasi Budaya Maritim

Revitalisasi Budaya Maritim merupakan bentuk nyata Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia melalui IORA sebagai wadahnya. Keterikatan histori, perdagangan dan persahabatan serta rasa kesamaan identitas antara Indonesia dan negara-negara anggota IORA selama berabad-abad menjadi sebuah peluang bagi Indonesia untuk mewujudkan kepentingannya. Revitalisasi budaya maritim ini juga merupakan bentuk visi misi PMD, yakni mewujudkan masyarakat yang berdaya saing serta berkepribadian dalam kebudayaan.

2.2 Pemberdayaan Sumber Daya Laut

Luas perairan Indonesia mencapai 5,8 juta km² atau 77% dari seluruh wilayah Indonesia. Dengan wilayah perairan yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut sangat besar dalam bentuk sangat bervariasi (mega biodiversity) sehingga dapat memberikan kontribusi sangat besar bagi

²⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam <https://djsn.go.id/storage/app/media/RPJM/BUKU%20I%20RPJMN%202015-2019.pdf> diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 14:40 WIB.

²⁵ *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Luar Negeri Republik Indonesia 2015-2019* (Jakarta, 2015).

perekonomian negara. Dengan luas wilayah 2/3 perairan, Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang sangat potensial terdiri potensi fisik, potensi pembangunan, potensi sumber daya pulih (renewable resources), potensi sumber daya tidak pulih (non-renewable resources) potensi geopolitik, dan potensi sumber daya manusia.

Potensi-potensi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi bargaining dalam melakukan kerja sama dengan negara lain, seperti dengan negara-negara anggota IORA. Dalam mempertahankan potensi yang dimiliki, Indonesia diperlukan menjaga kelestarian sumber daya kelautan agar tetap sustainable yang menjadi bahan dasar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. IORA sebagai wadah Indonesia berkomitmen dalam “*Perth Principles*” dan “*IORA Maritime Declaration*” serta “*First IORA Meeting of Experts on Maritime Safety and Security*” tentang konservasi dan pembangunan berkelanjutan; mengatasi tantangan maritim seperti penangkapan ikan secara ilegal, piracy, human smuggling, polusi dan pencemaran laut maupun penyeludupan secara ilegal secara bersama; membangun kapasitas negara untuk melestarikan, mengelola secara berkelanjutan serta mewujudkan manfaat perikanan berkelanjutan.

Kelestarian sumber daya kelautan merupakan indikator pokok dalam pencapaian kejayaan maritim bangsa. Dengan kemampuan menjaga kelestarian sumber daya tersebut berarti bangsa Indonesia menjamin sumber daya yang berkelanjutan (sustainable resources) untuk kelangsungan gen-

erasi yang akan datang. Kelestarian sumber daya kelautan adalah pencapaian dalam mewujudkan fungsi laut sebagai media kesejahteraan serta visi misi PMD, yakni mewujudkan kualitas SDM yang tinggi, maju dan sejahtera serta menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim yang artinya kesejahteraan bangsa dapat terukur dengan melihat tingkat kesejahteraan berbasis ke-maritiman yang dirasakan oleh masyarakatnya.²⁶

2.3 Konektivitas Maritim

Konektivitas, secara umum diterjemahkan sebagai suatu kejadian yang saling berkaitan antara ruang dan waktu, kemudian dalam konteks maritim diartikan sebagai hubungan dari daerah satu ke daerah lainnya. Konektivitas maritim merupakan kunci untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi kawasan yang berhubungan dengan berbagai infrastruktur, termasuk perbaikan sistem logistik nasional secara menyeluruh dengan berharap dapat mengurangi biaya logistik secara signifikan.²⁷

Struktur geografis merupakan alasan utama untuk suatu negara atau wilayah untuk menentukan sistem transportasi yang digunakannya. Struktur geografis Indonesia, dimana wilayah laut lebih luas dari wilayah daratannya, seharusnya transportasi laut menjadi prioritas penggunaan,

²⁶ Op. Cit Marsetio, Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia. hal 122

²⁷ DISKUMAL. “KONEKTIVITAS MARITIM” dalam <https://diskumal.tnial.mil.id/artikel/31/KONEKTIVITAS-MARITIM> diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 pukul 16:27 WIB

pengembangan dan perbaikan. Pada pertemuan COM ke-15 23 Oktober 2015 di Padang dengan tema *IORA Maritime Declaration*, IORA mendorong peningkatan dan pembangunan infrastruktur maritim yang berkelanjutan dan tangguh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bersama dalam mempersempit kesenjangan pembangunan dan memfasilitasi pergerakan masyarakat.²⁸

Komitmen pemerintah Indonesia mewujudkan PMD dilakukan dengan membangun hubports terlebih memahami posisi chokepoint Indonesia di antara dua samudra dan dua benua untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam meningkatkan kapabilitas ekonomi. Salah satunya dengan membangun sarana prasarana untuk memperlancar rute pelayaran yang telah ada dengan meningkatkan frekuensi dan juga membangun serta memaksimalkan infrastruktur yang ada. Hub maritim ini ditegaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2015-2019 dan dioperasionalkan melalui Tol Laut.

Pemerintah pada era Jokowi melakukan pemakasan terhadap *dwelling time* atau waktu tunggu barang di pelabuhan yang awalnya mencapai satu minggu menjadi tiga hari. Sebagai perbandingannya Singapura hanya menghabiskan waktu 1,5 hari untuk

dwelling time pada pelabuhan-pelabuhan besarnya. Contoh konkretnya biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang tiga kali lipat mahal daripada biaya pengiriman Jakarta ke Singapura.²⁹ Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur berupa peningkatan kapasitas sekaligus pembangunan 24 pelabuhan yang terdiri 19 pelabuhan perairan sedang dan pelabuhan perairan dalam, dilengkapi dengan pengadaan 500 kapal melalui impor dari RRT untuk menghubungkan pulau-pulau besar dengan pulau-pulau kecil

IORA sebagai wadah Indonesia dalam "*IORA Economic Declaration*", serta "*Modernising Trade in the Indian Ocean Rim Conference*" mendukung pengembangan infrastruktur melalui rencana nasional diprioritaskan seperti konektivitas maritim dengan membuat tol laut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Tol laut adalah bentuk perwujudan arti penting laut sebagai *relationship* atau media perhubungan untuk pemerataan pembangunan dan mempercepat arus distribusi komoditas. Tol Laut merupakan sistem jalur distribusi logistik menggunakan angkutan kapal barang dengan rute terjadwal dari ujung barat hingga timur dan dari utara ke selatan Indonesia. Tol laut bertujuan mengembangkan ekonomi maritim, dengan menjadikan laut sebagai basis konektivitas

²⁸ IORA. "Decision on the Establishment of an Ad-hoc Committee on the IORA Concord" dalam https://www.iora.int/media/8230/establishment_of_an_ad-hoc_committee_on_the_iora_concord_2015.pdf diakses pada tanggal 23 November 2021

²⁹ Op. Cit Yakti dan Susanto, "Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan atau Kesenambungan Strategi?"

produksi dan pemasaran antar daerah/pulau di Indonesia dan regional.³⁰

2.4 Diplomasi Maritim

Salah satu sasaran strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang ingin dicapai pada periode 2015-2019 adalah Diplomasi Maritim dan Perbatasan yang Kuat yang berarti negoisasi yang dilakukan dua negara atau lebih mengenai kerja sama kemaritiman dan penetapan penanganan permasalahan perbatasan baik laut maupun darat. Sasaran tersebut diukur dari indeks diplomasi maritim.³¹

IORA sebagai wadah diplomasi Indonesia dalam Jakarta Concord, IORA berkomitmen meningkatkan pengelolaan, konservasi sumber kekayaan alam hayati dan perlindungan serta pelestarian lingkungan laut serta meningkatkan konektivitas daerah sejalan dengan delapan arah kebijakan Kementerian Luar Negeri Indonesia yang memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai poros maritim dunia, termasuk keketuaan Indonesia di IORA.

2.5 Pembangunan Pertahanan Maritim

Pembangunan pertahanan negara baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter, diselenggarakan

secara terpadu dengan mengacu pada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta. Pertahanan militer diselenggarakan untuk menghadapi ancaman militer dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Pertahanan nirmiliter diselenggarakan untuk menghadapi ancaman nonmiliter dengan menempatkan Kementerian / Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama.³²

Pembangunan pertahanan maritim merupakan salah satu instrumen penting bagi Indonesia dalam mewujudkan PMD. Ancaman-ancaman yang datang khususnya dari laut diperlukan tindakan *preventif* dalam mengatasi ancaman tersebut. Salah satu Rencana Strategis KEMENLU dan sebuah tindakan *preventif* adalah dengan membangun kekuatan maritim yang relevan terhadap komitmen IORA sebagai wadah diplomasi Indonesia dalam membangun kawasan yang lebih damai, stabil, dan sejahtera.

Dalam permasalahan pertahanan, IORA memiliki prioritas fokus utama yaitu *maritime safety and security* sejak tahun 2011 yang bertujuan untuk mengamankan kegiatan anggotanya dari ancaman-ancaman keamanan di wilayah Samudra Hindia. Samudra Hindia yang aman dan stabil menjadi kunci penting Indonesia dalam mewujudkan PMD yang dididungungkan pada tahun 2014 silam.

³⁰ Devi Destiani Andilas dan Liana Angelina Yanggana, "Pelaksanaan Program Tol Laut PT Pelayaran Nasional Indonesia," *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik* 4, no. 1 (2017): 1-8.

³¹ *Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Luar Negeri Republik Indonesia 2015-2019*, hal 35

³² Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan* (Jakarta, 2015).

3. Optimalisasi Poros Maritim Dunia Melalui IORA

Strategi Indonesia mewujudkan PMD memerlukan sumber daya (means) guna mendukung tujuan Indonesia menjadi negara PMD. Dalam poin kebijakan Renstra KEMENLU, Indonesia telah meningkatkan diplomasi dengan kerangka kerja sama terhadap sub-kawasan khusus IORA dan didukung Indonesia menjabat sebagai ketua IORA pada tahun 2015-2017. Kerangka kerja sama antara Indonesia dengan negara anggota IORA relevan terhadap optimalisasi PMD oleh Indonesia melalui IORA. Kerja sama dengan tiga negara anggota IORA yakni Afrika Selatan, Sri Lanka dan Mozambik.

Keinginan mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong diperlukannya optimalisasi potensi sumberdaya nasional yang dimiliki. Optimalisasi potensi-potensi sumber daya tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain seperti Afrika Selatan, Mozambik dan Sri Lanka yang merupakan anggota IORA.

a. Indonesia – Afrika Selatan

Indonesia melakukan kerja sama dengan Afrika Selatan dimulai pada pertemuan KTT IORA 2017 di Jakarta. Atas undangan presiden Joko Widodo, presiden Jacob Zuma melakukan kunjungan kenegaraan ke Republik Indonesia pada 08 Maret 2017 untuk meningkatkan hubungan bilateral politik dan ekonomi kedua negara itu.

Dalam kunjungan kenegaraan Republik Afrika Selatan ke Republik Indonesia tersebut telah ditandatangani tiga kesepakatan oleh kedua kementerian, yakni:³³

1. The Visa Waiver Agreement untuk pemegang paspor diplomatik, resmi dan dinas antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Afrika Selatan;
2. MoU antara Kementerian Luar Negeri dengan Lembaga Diklat DIRCO (Department of International Relations and Cooperation) mengenai kerja sama Pendidikan dan Pelatihan Diplomati;
3. Plan of Action 2017-2021 untuk Implementation of the Joint Declaration of Strategic Partnerships for a Prosperous and Peaceful Future antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Afrika Selatan

Indonesia dan Afrika Selatan juga sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi, utamanya di sektor infrastruktur, manufaktur dan pertanian. Peningkatan investasi tersebut tidak hanya diarahkan pada inbound investment Afrika Selatan di Indonesia melainkan juga pada peningkatan outbound investment Indonesia di Afrika Selatan.³⁴

³³ South Africa Embassy. "Bilateral Relation" dalam <http://www.dirco.gov.za/jakarta/bilateral.html> diakses pada tanggal 04 September 2021 pukul 06:05 WIB.

³⁴ KEMENLU. "Konsultasi Bilateral RI-Afsel Perdana Dorong Penguatan Kerja Sama

b. Indonesia – Mozambik

Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan dengan presiden Mozambik Filipe Jacinto Nyusi, yang berlangsung disela-sela KTT IORA pada Maret 2017. Kedua pemimpin negara sepakat meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian dagang preferensial antara Indonesia dengan Mozambik. Selain perjanjian dagang, Indonesia dan Mozambik menandatangani The Visa Waiver Agreement untuk pemegang paspor diplomatik, resmi dan dinas.

IM-PTA dilakukan dengan tiga proses perundingan, pada perundingan kedua, dilaksanakan disela-sela Indonesia Africa Forum (IAF) pada 2018 di Bali oleh Mendag Indonesia dan Memperindag Mozambik. Perundingan IM-PTA secara resmi diselesaikan pada pelaksanaan Indonesia-Africa Infrastructure Dialog (IAID) pada tanggal 20-21 Agustus 2019 di Nusa Dua, Bali.³⁵

Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA) merupakan kerja sama peningkatan akses pasar secara resiprokal melalui

Konkrit” dalam <https://kemlu.go.id/portal/id/read/880/berita/konsultasi-bilateral-ri-afrika-selatan-perdana-dorong-penguatan-kerja-sama-konkrit> diakses pada tanggal 04 September 2021 pukul 06:00 WIB.

³⁵ KEMENDAG. “Indonesia-Mozambik Preferential Trade Agreement” dalam <https://www.kemendag.go.id/storage/files/2019/08/21/pta-indonesia-mozambik-selesai-dan-siap-ditandatangani-id0-1566375047.pdf> diakses pada tanggal 04 September 2021 pukul 07:18 WIB

penurunan tarif bea masuk untuk beberapa produk yang menjadi kepentingan dari masing-masing negara. IM-PTA merupakan kerja sama perdagangan pertama yang dimiliki Indonesia dengan negara dari benua Afrika.³⁶ Benua Afrika merupakan pasar non-tradisional yang memiliki potensi besar sebagai tujuan ekspor produk-produk Indonesia. Untuk itu, Mozambik dipilih sebagai mitra kerja sama PTA karena beberapa hal sebagai berikut:³⁷

1. Menjadi hub produk Indonesia khususnya di kawasan selatan Afrika.
2. Situasi politik dan keamanan yang relatif stabil.
3. Memiliki tiga pelabuhan laut dalam dan salah satu pelabuhan Mozambik, Maputo Port, merupakan deep sea port serta salah satu pelabuhan terbesar di kawasan selatan Afrika.

Berbeda dengan FTA (Free Trade Area) ataupun CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement), ruang lingkup PTA terbatas pada perdagangan barang dan hanya mencakup beberapa produk. Oleh karena itu, proses perundingan PTA relatif lebih cepat apabila dibandingkan dengan proses perundingan FTA maupun CEPA, sehingga dapat segera

³⁶ KEMENDAG. “Fact Sheet Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement” dalam https://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20190918_fact-sheet-indonesia-mozambik-pta.pdf diakses pada tanggal 25 November 2021 pukul 16:36 WIB.

³⁷ Ibid.

dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha.³⁸

Melalui IM-PTA, Indonesia memberikan tarif preferensi terhadap sekitar 200 pos tarif kepada Mozambik, diantaranya kapas, tembakau, produk perikanan, sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Sebaliknya, Mozambik memberikan tarif preferensi terhadap sekitar 200 pos tarif kepada Indonesia, diantaranya produk perikanan, buah-buahan, minyak kelapa sawit, margarin, sabun, karet, produk kertas, alas kaki, serta produk tekstil.

Tujuan dan manfaat IM-PTA bagi Indonesia, yakni dapat mendorong minat pengusaha untuk lebih memanfaatkan potensi pasar non-tradisional, termasuk investasi;³⁹ dapat juga mendorong pelaku usaha Indonesia untuk *go global* melalui outward investment dan meningkatkan level of competitiveness; dan menurut hasil kajian BPPP Kemendag, kerja sama penurunan tarif akan meningkatkan impor Indonesia sebesar US\$ 1,3 juta sedangkan Mozambik akan mengalami kenaikan impor US\$ 5 juta. Dengan demikian kerja sama penurunan tarif berpotensi meningkatkan surplus neraca perdagangan Indonesia.⁴⁰

c. Indonesia – Sri Lanka

³⁸ Ibid.

³⁹ Bisnis.com. “Indonesia Teken PTA dengan Mozambik” dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/12/1142043/indonesia-teken-pta-dengan-mozambik-apa-saja-keuntungannya-bagi-ekspor> diakses pada tanggal 04 September 2021 pukul 07:23 WIB.

⁴⁰ Op Cit. KEMENDAG. “Fact Sheet Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement”

Presiden RI Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Yang Mulia Tuan Maithripala Sirisena, yang berlangsung disela-sela KTT IORA pada 06 Maret 2017. Pertemuan berlanjut dengan dilakukan upacara kenegaraan menyambut kehadiran Presiden Maithripala Sirisena di Istana Merdeka pada 08 Maret 2017. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Maithripala Sirisena ke Republik Indonesia telah ditandatangani tiga kesepakatan oleh dua kementerian, yaitu:⁴¹

1. Memorandum of Understanding antara Republik Indonesia dan Republik Sosial Demokratik Sri Lanka dalam Bidang Kelautan dan Perikanan.
2. Komunike Bersama untuk Memerangi Penangkapan Ikan yang Tidak Sah, dan Tidak Dilaporkan (IUU Fishing) dan untuk Memajukan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan.
3. Memorandum of Understanding Kerja Sama antara Republik Indonesia dan Republik Sosial Demokratik Sri Lanka dalam Bidang Industri Tradisional.

Indonesia dan Sri Lanka sepakat memperkuat kerja sama dalam bidang ekonomi seperti RI mendukung

⁴¹ KKPNews. “RI – Sri Lanka Sepakati Kerja Sama Berantas Illegal Fishing dan Kelola Perikanan Berkelanjutan” dalam <https://news.kkp.go.id/index.php/ri-sri-lanka-sepakati-kerja-sama-berantas-illegal-fishing-dan-kelola-perikanan-berkelanjutan/> diakses pada tanggal 07 September 2021 pukul 17:39 WIB.

pembangunan di Sri Lanka.⁴² Pemerintah RI dan Pemerintah Sri Lanka juga menandatangani Memorandum of Understanding antara Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Pusat Sri Lanka tentang kerja sama dalam bidang manajemen pemilihan umum dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai demokrasi melalui kerja sama dalam bentuk pertukaran informasi dan kegiatan-kegiatan lain dalam bidang manajemen pemilu.⁴³

Kerja sama Indonesia dengan Sri Lanka bentuk upaya Indonesia melaksanakan poin Renstra dalam mendorong peningkatan kerja sama dalam bidang keamanan dan keselamatan laut, serta search and rescue serta manajemen perikanan dan kelautan berkelanjutan dengan didukung IORA sebagai wadah diplomasi Indonesia.

PENUTUP

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia (The Largest Archipelagic in the World) yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil dengan jumlah ±17.000 pulau dengan luas laut mencakup 5,8 juta km² atau sekitar 80% dari total luas Indonesia. Indonesia terletak di antara dua samudra (Samudra Pasifik dan Samudra Hindia) dan dua benua (Benua Asia dan Benua Austral-

ia). Wilayah perairan Indonesia terletak pada posisi silang dunia yang menjadi bagian dari *Sea Lanes of Communications* (SLOCs) dan *Sea Lines of Trade* (SLOT) serta *Sea Lanes of Economics* (SLOE) yang merupakan jalur transportasi urat nadi perekonomian dunia.

Indonesia memiliki kondisi geografis, historis dan budaya leluhur yang sejak lama dikenal sebagai Nusantara, yaitu bangsa yang sangat ahli dalam bidang maritim. Pandangan mengenai kemaritiman sudah ada sebelum istilah “Nusantara” muncul dan terbentuknya NKRI. Dari rezim ke rezim, Indonesia masih berada pada proses pencarian mengenai konsepsi dan penerapan sebuah negara maritim dan pada masa presiden Joko Widodo, muncul sebuah konsepsi kemaritiman dengan visi yang besar, yakni Poros Maritim Dunia.

Konsep Poros Maritim Dunia adalah sebuah seruan mengembalikan jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim. Konsep ini sejalan dengan potensi-potensi alamiah Indonesia dari aspek geopolitik, historis dan budaya. Dalam penerapannya, Indonesia tidak dapat melakukannya hanya dari sisi internal saja, maka dari itu dibutuhkan dukungan-dukungan politik luar negeri regional dan internasional.

Dalam mewujudkan Konsep PMD, Indonesia memerlukan strategi yang dirancang untuk mencapai negara maritim. Strategi Indonesia menuju negara PMD memerlukan wadah dalam menerapkan konsep PMD. Indonesia mendapat opportunity pada Min-

⁴² Ibid.

⁴³ KEMENLU. “Memorandum of Understanding between the General Elections Commission of the Republic of Indonesia and the Sri Lanka Election Commission on Cooperation in the Field of Election Management” dalam <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filena me=LKA-2016-0024.pdf> diakses pada tanggal 25 November 2021 pukul 17:48 WIB.

isterial Meeting 23 Oktober 2015 lalu, dimana Indonesia resmi dilantik sebagai ketua IORA selama dua tahun. IORA merupakan asosiasi lingkaran Samudra Hindia yang disatukan oleh histori, geopolitik serta rasa kesamaan identitas.

Bagi Indonesia, IORA merupakan sebuah wadah yang relevan bagi Indonesia dengan ketersinggungan antara tujuan IORA, yakni enam prioritas utama serta dua area khusus dan lima pilar poros Poros Maritim Indonesia. Strategi Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia adalah dengan melalui IORA. Indonesia melakukan metode dan proses (*ways*) untuk mewujudkan PMD di antaranya, yakni:

1. Revitalisasi budaya maritim, yakni mewujudkan masyarakat yang berdaya saing serta berkepribadian dalam kebudayaan.
2. Pemberdayaan sumber daya laut, yakni dengan melakukan kelestarian sumber daya kelautan. Kelestarian sumber daya kelautan indikator pokok dalam pencapaian kejayaan maritim bangsa.
3. Konektivitas maritim, yakni kunci untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi kawasan dengan pengembangan infrastruktur laut seperti tol laut.
4. Diplomasi maritim, yakni manajemen hubungan antar negara melalui domain maritim. Diplomasi maritim Indonesia mengacu pada Renstra KEMENLU 2015-2019.

5. Pembangunan pertahanan maritim, yakni membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim.

Dalam upaya-upaya Indonesia mewujudkan PMD juga memerlukan kerja sama dengan negara lain (*means*). Upaya-upaya optimalisasi PMD oleh Indonesia adalah kerja sama dengan negara anggota IORA, yakni:

1. Indonesia bersama Afrika melakukan kerja sama dalam beberapa kesepakatan, sebagai berikut:
 - a. *The Visa Waiver Agreement* tentang pemegang paspor diplomatik, resmi dan dinas,
 - b. *Memorandum of Understanding* antara Kementerian Luar Negeri dengan Lembaga Diklat DIRCO mengenai kerja sama pendidikan dan pelatihan diplomatik,
 - c. *Plan of Action 2017-2021* antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Afrika Selatan, dan
 - d. Indonesia dan Afrika Selatan sepakat untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi, utamanya di sektor infrastruktur, manufaktur dan pertanian.
2. Indonesia bersama Mozambik melakukan kerja sama dalam

beberapa kesepakatan, sebagai berikut:

- a. Indonesia-Mozambik Preferential Trade Agreement (IM-PTA), dan
 - b. The Visa Waiver Agreement tentang pemegang paspor diplomatik, resmi dan dinas.
3. Indonesia bersama Sri Lanka melakukan kerja sama dalam beberapa kesepakatan, yakni:
- a. Memorandum of Understanding antara RI dan Sri Lanka dalam bidang kelautan dan perikanan,
 - b. Komunikasi Bersama antara RI dan Sri Lanka tentang IUU Fishing dan untuk memajukan tata kelola perikanan berkelanjutan,
 - c. Memorandum of Understanding antara RI dan Sri Lanka dalam Bidang Industri Tradisional.
 - d. Memorandum of Understanding antara Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Pusat Sri Lanka tentang kerja sama dalam bidang manajemen pemilihan umum.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Indonesia dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia melalui IORA pada tahun 2015-2017 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia melalui IORA melakukan ekspansi dan dominasi di negara-negara Afrika.

DAFTAR PUSTAKA

AK Susilo, U Ciptomulyono, I Nengah

Putra. "Maritime Strategy Development to Encounter the Threat of National Sea Security in Indonesia Territory." *Journal of Defense Resources Management*. 9, no. 2 (2018): 147–171.

Andilas, Devi Destiani, dan Liana Angelina Yanggana. "Pelaksanaan Program Tol Laut PT Pelayaran Nasional Indonesia." *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik* 4, no. 1 (2017): 1–8.

Bisnis.com. "Indonesia Teken PTA dengan Mozambik" dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/12/1142043/indonesia-teken-pta-dengan-mozambik-apa-saja-keuntungannya-bagi-ekspor> diakses pada tanggal 04 September 2021 pukul 07:23 WIB.

Falahi, Ziyad. "Memikirkan Kembali Arti Million Friends Zero Enemy dalam Era Paradox of Plenty." *Global & Strategis* 7 (2013): 227–240.

Holsti, K.J. *Governance Without Government: Order and Change in World Politics dalam Governance Without Government: Polyarchy in Nineteenth-Century European International Politics*. Cambridge Press. Hal 29.

Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik. *Buku Putih Pertahanan*. Jakarta, 2015.

IORA. "Decision on the Establishment of an Ad-hoc Committee on the IORA Concord" dalam

- https://www.iora.int/media/8230/establishment_of_an_adhoc_committee_on_the_iora_concord_2015.pdf diakses pada tanggal 23 November 2021
- Joesoef, Daoed. *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2014.
- KEMENDAG. “Fact Sheet Indonesia-Mozambique Preferential Trade Agreement” dalam https://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20190918_fact-sheet-indonesia-mozambik-pta.pdf diakses pada tanggal 25 November 2021 pukul 16:36 WIB.
- KEMENDAG. “Indonesia-Mozambik Preferential Trade Agreement” dalam <https://www.kemendag.go.id/storage/files/2019/08/21/pta-indonesia-mozambik-selesai-dan-siap-ditandatangani-id0-1566375047.pdf> diakses pada tanggal 04 September 2021 pukul 07:18 WIB
- KEMENLU. “Konsultasi Bilateral RI-Afsel Perdana Dorong Penguatan Kerja Sama Konkrit” dalam <https://kemlu.go.id/portal/id/read/880/berita/konsultasi-bilateral-ri-afrika-selatan-perdana-dorong-penguatan-kerja-sama-konkrit> diakses pada tanggal 04 September 2021 pukul 06:00 WIB.
- KEMENLU. “Memorandum of Understanding between the General Elections Commission of the Republic of Indonesia and the Sri Lanka Election Commission on Cooperation in the Field of Election Management” dalam <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=LKA-2016-0024.pdf> diakses pada tanggal 25 November 2021 pukul 17:48 WIB.
- KKPNews. “RI – Sri Lanka Sepakati Kerja Sama Berantas Illegal Fishing dan Kelola Perikanan Berkelanjutan” dalam <https://news.kkp.go.id/index.php/ri-sri-lanka-sepakati-kerja-sama-berantas-illegal-fishing-dan-kelola-perikanan-berkelanjutan/> diakses pada tanggal 07 September 2021 pukul 17:39 WIB.
- LEMHANNAS. “Swantara” dalam http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Swantara/Swantara_11_Desember_2014.pdf diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 06:43 WIB.
- Limbong, Bernhard. *Poros Maritim*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2015.
- Mahan, A. T. *The Influence of Sea Power upon History, 1660-1783*. 12th Edition, (Boston: Little, Brown, 1918).
- Marsetio. *Mengembalikan Kejayaan Maritim Indonesia*. Jawa Barat: Universitas Pertahanan, 2018.
- . “Sea Power Indonesia.” Jakarta: Universitas Pertahanan, 2014.

- Mearsheimer, John J. (1995). "The False Promise of International Institutions". *International Security*. 19 (3): 5-49.
- Muhamad, Simela Victor. "Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia." *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) VI*, no. 21 (2014): 4.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam <https://djsn.go.id/storage/app/media/RPJM/BUKU%20I%20RPJMN%202015-2019.pdf> diakses pada tanggal 16 Maret 2022 pukul 14:40 WIB.
- Piesse, Mervyn. *The Indonesian Maritime Doctrine: Realising the Potential of the Ocean*. Future Directions International Pty Ltd. Australia. 2015. Hal. 2.
- Poerwowidagdo, Sapto J. "Blue Ocean Strategy in Managing Maritime Security." *Jurnal Pertahanan*. 1, no. 1 (2015): 13–26.
- Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Luar Negeri Republik Indonesia 2015-2019*. Jakarta, 2015.
- South Africa Embassy. "Bilateral Relation" dalam <http://www.dirco.gov.za/jakarta/bilateral.html> diakses pada tanggal 04 September 2021 pukul 06:05 WIB
- Yakti, Probo Daron, dan Joko Susanto. "Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan atau Kesenambungan Strategi?" *Global dan Strategis* 11, no. 02 (2017): 108–125.